



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 861/V/2015

I/MEI 2015



Budidaya Ikan Kerapu di Pessel Menjanjikan



Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

Budidaya Ikan Kerapu di Pessel Menjanjikan



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau budidaya ikan Kerapu di Kabupaten Pasisir Selatan, Sumbar

Komisi IV DPR RI menilai budidaya ikan Kerapu di Kabupaten Pasisir Selatan (Pessel), Sumbar memiliki potensi untuk berkembang lebih maju. Pemerintah bersama DPR patut memberikan dukungan kepada nelayan di sentra keramba apung yang tersebar di wilayah ini.

“Kita mengharapkan pemerintah melalui APBN mendorong sentra budidaya ikan kerapu di daerah-daerah pesisir termasuk di Pesisir Selatan ini. DPR tentu akan membantu produktivitasnya sampai pada tingkat regulasi misalnya jangan sampai ada aturan yang menghambat pemasaran,” kata anggota Komisi IV Hermanto disela

kunjungan kerja di Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (27/4/15).

Politisi dari Fraksi PKS ini menambahkan dari peninjauan lapangan terlihat keramba apung terlindungi dari ombak besar karena tersebar diantara pulau-pulau kecil yang banyak terdapat di wilayah ini. Ia berharap Kerapu Macan dan Kerapu Bebek yang memiliki potensi ekspor tinggi pada saatnya dapat meningkatkan taraf hidup nelayan.

Bicara pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kunker Herman Khaeron mengingatkan potensi perikanan berkelanjutan atau *maximum sustainable yield* (MSY) dari 11 wilayah di Indonesia adalah 6,512 juta ton/tahun. Dari

potensi itu jumlah ikan yang boleh ditangkap adalah 80 persennya atau 4,5-5 juta ton/tahun.

“Memperhatikan kondisi itu maka potensi ikan budidaya seperti keramba ikan Kerapu seperti yang kita tinjau ini sangat baik. Jadi patut dikembangkan karena bernilai ekonomis, dapat mensejahterakan rakyat,” tekannya. Namun ia mengingatkan, pemerintah daerah benar-benar memprioritaskan rakyat, bukan para pemilik modal atau tengkulak.

Bersama tim kunker, Herman berkesempatan melakukan panen ikan Kerapu pada salah satu keramba modern yang terbuat dari plastik, bantuan



pemerintah pusat. Nelayan pelaku budidaya juga diminta memberikan masukan terutama kendala-kendala yang dihadapi.

Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit

yang mendampingi kunjungan ini menjelaskan keramba jaring apung sudah dikembangkan di tiga kecamatan yaitu Batangkapas, Koto XI Tarusan dan IV Jurai. Ia berharap bantuan

pemerintah berupa keramba modern dari plastik bisa ditingkatkan kuantitasnya karena lebih kuat dan mudah penggunaannya. (iky) foto: ibnur khalid/parle

Rencana Pembangunan Gedung Baru Akan Disampaikan ke Konstituen

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengemukakan, DPR sekarang dalam masa reses yang akan berlangsung hingga 17 Mei 2015. Seluruh anggota Dewan selain tengah melakukan kunjungan kerja juga sebagian sudah ke dapil masing-masing. Pada saat di daerah pemilihan (dapil), mereka wajib untuk menyerap aspirasi konstituenya termasuk menyampaikan rencana pembangunan gedung baru.

Ditemui wartawan di Gedung DPR Senayan, Selasa (28/4), politisi Partai Demokrat ini menyatakan, apakah saat sosialisasi rakyat menyetujui, atau ada koreksi silahkan sampaikan kepada anggota Dewan. Anggota DPR pasti akan mendengarkan, sebab mereka punya kepentingan nanti pada pemilu tahun 2019 untuk dipilih lagi.

“Itulah tugas anggota dewan untuk

menjaring aspirasi termasuk sosialisasi. Tidak hanya dilakukan oleh kesekjenan kepada fraksi-fraksi, tetapi juga dilakukan anggota Dewan,” ujarnya.

Termasuk dia sendiri, lanjut Agus, pada pekan depan akan melakukan kunjungan kerja ke dapil, dan menyampaikan penjelasan mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut. Kalau memang nanti hasilnya masyarakat menolak, akan disampaikan dalam rapat, sebab ini memang masih dalam taraf persiapan perencanaan. Silahkan, seluruhnya dikritisi dan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan pengawasan.

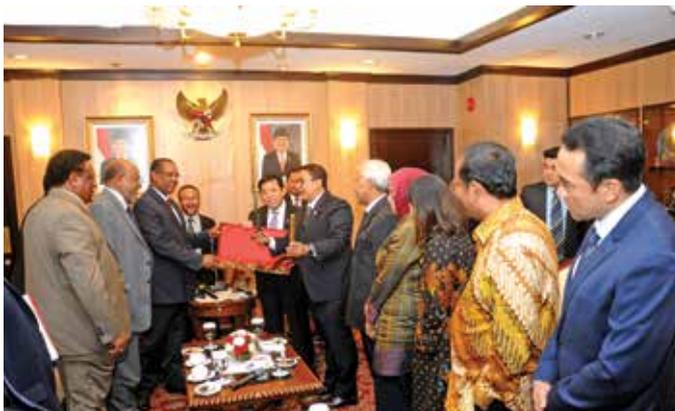
“Kalau memang tidak betul, silahkan sampaikan kepada anggota Dewan melalui konstituennya masing-masing. Anggota Dewan pasti akan menerima



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

aspirasi tersebut. Apalagi kalau anggota dimaksud masih mau berlaga di tahun 2019,” tutup Agus Hermanto. (mp) foto: denus/parle

Neraca Perdagangan Indonesia-Sudan Perlu Ditingkatkan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meyerahkan cenderamata kepada Delegasi Parlemen Sudan

Ketua Parlemen Sudan Al- Fateh Izzeldin Al-Mansour dan rombongan Rabu (22/4) di ruang kerja Lantai III Gedung Nusantara III, Senayan menemui Ketua DPR Setya Novanto

didampingi Wakil Ketua Fadli Zon, Agus Hermanto serta Ketua BKSAP Nuhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha juga Wakil-wakil Ketua BKSAP Teguh Juwarno dan Meutya Hafid.

Kedatangan Ketua Parlemen Sudan ke Indonesia adalah dalam rangka menghadiri Konperensi Asia Afrika sekaligus Konperensi Parlemen Asia-Afrika yang digelar Kamis (23/4). Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh persaudaraan ini, kedua parlemen sepakat untuk meningkatkan kerjasamanya.

Secara khusus, Pimpinan DPR Koordinator Industri dan Pembangunan ini meminta Sudan untuk meningkatkan neraca perdagangannya dengan Indonesia. Meski sudah ada pabrik Indomie di Sudan, kerjasama ekonomi kedua negara bisa diperluas lagi baik di bidang pertanian maupun perminyakan.

Begitu juga bidang alat utama sistem persenjataan (alutsista) kerjasama Indonesia dan Sudan masih perlu diting-

katkan lagi. Disamping itu, lanjut Agus Hermanto, usulan yang ditanggapi dengan antusias Parlemen Sudan adalah pembentukan Forum Parlemen Asia Afrika. Parlemen Sudan menerima usulan tersebut dengan baik bahkan menyarankan agar dalam Sidang Parlemen Asia-Afrika ini *draft* (rancangan) usulan itu sudah disiapkan.

“Intinya usulan Pembentukan Forum Parlemen Asia-

Afrika tersebut disetujui dan akan ditindaklanjuti pada pembahasan di Ibukota Sudan Karthoum. Gagasan ini akan bisa terwujud,” kata Agus. Soal hubungan DPR dengan Parlemen Sudan, sekarang ini di DPR sudah terbentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan Parlemen Sudan. (mp) foto: *denus/parle*

Pembangunan Ikon Nasional Akan Jadi Warisan Bangsa



Ketua DPR RI Setya Novanto

DPR telah mengesahkan usulan anggaran DPR RI Tahun 2016 yang arah kebijakannya memperkuat peran repre-

sentasi DPR yang dimaksudkan untuk mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.

Hal itu dikatakan Ketua DPR Setya Novanto ketika membacakan Pidato Penutupan Masa Persidangan III tahun 2014-2015 di depan Sidang Paripurna DPR Jumat (24/4) malam.

Menurut Pimpinan Dewan dari FPG ini, dalam rangka penguatan kelembagaan, DPR membentuk Tim kerja Pembangunan Perpustakaan, Museum, *Research Center*, dan Ruang Kerja Anggota dan Tenaga Ahli DPR yang sekaligus akan menjadi ikon nasional.

“DPR berpandangan bahwa pembangunan ikon nasional ini akan menjadi warisan bangsa, sebab setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun reformasi, lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memberi dukungan terhadap rencana besar ini. Pembangunan ikon nasional, tambah Novanto, telah mendapat persetujuan Presiden. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Agustus 2015 setelah Pidato Presiden mengenai penyampaian Nota Keuangan, Presiden dan tamu negara akan diajak mengunjungi museum dan perpustakaan yang ada sementara ini.

Pada kesempatan yang sama, lanjut Ketua DPR, Presiden akan menandatangani komitmen membangun ikon nasional bersama dan peletakan batu pertama untuk pembangunan ikon nasional tersebut. (mp) foto: *denus/parle*

DPR Akan Tradisikan Seruan Patuhi Kode Etik Dan Kedisiplinan



Pimpinan DPR saat Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun 2014/2015

Ketua DPR Setya Novanto menegaskan, Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI akan melakukan perubahan format presensi anggota DPR baik dalam Rapat Paripurna maupun Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menjadi lebih rinci. Dengan demikian publik dapat mengetahui alasan ketidakhadiran Anggota DPR. Upaya lain yang akan dilakukan adalah penguatan kelembagaan.

“MKD akan memberikan apresiasi kepada Anggota DPR yang bekerja dengan baik,” ungkap Novanto saat menyampaikan pidato penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2014 – 2015,

Jumat (24/4) malam.

Untuk masa yang akan datang, menurut Novanto, DPR akan mentradisikan seruan untuk selalu mematuhi kode etik dan kedisiplinan selama menjalankan tugasnya. Untuk itu, Pimpinan Rapat sebelum memulai rapat harus menyerukan kepatuhan terhadap kode etik dan kedisiplinan Anggota DPR.

Searah dengan upaya penguatan

dan peningkatan kinerja lembaga DPR, melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) sedang menyusun Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 dan Peraturan DPR RI tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran DPR RI.

Berkaitan dengan upaya penguatan dan peningkatan kinerja lembaga DPR ini, Badan Legislasi diharapkan lebih berperan dalam menyusun, meng-

evaluasi, dan menyempurnakan berbagai Peraturan DPR RI. Di antaranya mengenai peran diplomasi, reses dan representasi, serta pertanggungjawaban kunjungan kerja dan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR.

Upaya tersebut merupakan bagian dari langkah DPR memperbaiki sistem kerja dan kelembagaan DPR menuju parlemen modern. (mp) foto: andri/parle/dns

Paripurna DPR Sahkan Perppu KPK Jadi UU



Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyerahkan laporan pembahasan Perppu Pimpinan KPK

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) no.1/2015 tentang Perubahan UU KPK menjadi undang-undang. Keputusan ini berarti dewan sepakat dengan langkah presiden, mengisi kekosongan Pimpinan KPK agar keberlangsungan dan kesinambungan pemberantasan korupsi dapat terjaga.

“Langkah ini perlu dalam menjaga kredibilitas Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan hukum yang cepat dan tepat

dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin dalam laporannya pada Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat malam (24/4).

Ia menyebut DPR dapat menerima alasan presiden dalam menerbitkan Perppu KPK diantaranya telah terjadi kegentingan yang memaksa sesuai UUD NRI tahun 1945, pasal 22 ayat 1. Untuk mendalami permasalahan komisi yang membidangi hukum ini telah membentuk Panitia Kerja (Panja),

menghimpun masukan dari sejumlah pihak diantaranya pakar hukum, masyarakat dan melakukan rapat kerja dengan Menkumham.

Aziz melanjutkan, keputusan Komisi III menerima Perppu dilengkapi dengan sejumlah catatan. Meminta pemerintah segera mempercepat proses seleksi calon Pimpinan KPK periode 2015-2019. Komisi Hukum juga meminta meningkatkan kedudukan Komite Etik KPK yang bersifat *ad hoc* menjadi permanen untuk mengawasi kinerja KPK.

Catatan lain komisi antirasuah ini perlu dijaga marwah dan independensinya dengan melarang Pimpinan KPK mengundurkan diri untuk menjadi pejabat negara dan dua tahun pasca menjabat sebagai pimpinan.

Proses pembasan tingkat II ini berlangsung mulus. Pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPR Fadli Zon segera mengetuk palu setelah mendapat persetujuan dari peserta rapat.

Sementara itu Menkumham Yasona Laoly mengatakan menghargai sejumlah catatan yang diberikan Komisi III dan menjadi bahan revisi UU KPK. Ia menyarankan agar perubahan UU no.30/2002 tersebut dapat menjadi usul inisiatif DPR. (iky) foto: andri/parle

Perangi Narkoba Harus Diimbangi Kemampuan Diplomasi

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan pemerintah yang bersikap tegas memerangi narkoba adalah konsekuensi pilihan kebijakan. “Saya sangat mendukung hukuman mati itu dilakukan, sebagai sinyal kita perangi narkoba sebab narkoba ini satu kejahatan yang sangat serius. Namun di sisi lain

harus diimbangi kemampuan diplomasi kita kepada negara-negara sahabat yang terkena dampak termasuk Australia, Perancis dan negara-negara lain,” kata Fadli Kamis (30/4) menanggapi protes Australia terhadap pelaksanaan eksekusi mati gembong narkoba di Nusakambangan, Rabu dini hari.

Menurut Pimpinan DPR Koordinator Polkam ini, Presiden juga perlu mempertimbangkan hubungan dengan negara-negara sahabat. Bukan berarti kita melemah, tetapi perlu dipikirkan dampaknya. Kalau negara-negara tersebut yang tadinya bersahabat kemudian menjadi musuh.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

“Kebijakan zero enemy itu menurut saya penting bagi Indonesia, karena dengan melaksanakan hukuman mati berarti tidak ada masalah. Tapi kalau kita punya titik lemah, di-

anggap tidak adil atau mengejar popularitas, saya kira bisa menjadi masalah bagi negara-negara tersebut,” tegasnya.

Pasalnya, lanjut politisi Gerindra, ini bukan semata-mata narkoba lagi tetapi menyangkut kehormatan sebuah negara. Kalau ada permintaan dari Perdana menteri atau Presiden dan ditolak mentah-mentah, kita harus siap dengan negara tersebut tidak bersahabat lagi.

Saat ditanya apakah perlu kita balas dengan menarik dubes Indonesia dari Australia, kata Fadli, kita sebagai negara yang disorot, maka tidak perlu melakukan tindakan itu. “Presiden bisa mempertimbangkan kalau permintaan dari Kepala Negara setidaknya menunda eksekusi. Kepala negara atau kepala pemerintah paling tidak ada muka di mata bangsanya,” ia menjelaskan.

Begitu ditolak wajar saja kalau mereka marah. Termasuk penundaan eksekusi pada Marry Jane dari Filipina, menurut Fadli kalau masih ada upaya hukum sekecil apapun menyangkut nyawa orang kita harus beri kesempatan, apalagi Sergei dari Perancis, termasuk yang belum akan dieksekusi. “Jadi mestinya ditunda. Jangan sampai nanti gara-gara ini hubungan kedua negara akan memburuk,” pungkask dia.

(mp) foto: denus/parle

Klaim Penurunan BPIH Prestasi Pemerintah Berlebihan

Klaim yang menyebut bahwa penurunan besaran BPIH (biaya perjalanan ibadah haji) sebagai prestasi pemerintah karena pro-rakyat dinilai terlalu berlebihan. Bahkan klaim seperti itu dianggap tidak sesuai dengan fakta yang terjadi ketika pembahasan BPIH dilangsungkan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay kepada Parlemenaria, Selasa (28/4).

“Mulanya, pemerintah menawarkan BPIH sebesar 3195 dolar Amerika. Dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3219 USD, memang turun 26 dolar Amerika. Kalau DPR menyetujui itu, berarti jamaah akan membayar lebih dari 40 juta rupiah dengan kurs dollar yang masih bertahan pada kisaran 13 ribu rupiah,” ujar Saleh.

Karena tidak menyetujui usulan itu, panja BPIH komisi VIII kemudian meminta Kemenag untuk melakukan rasionalisasi dan efisiensi. Di saat bersamaan dilanjutkan Saleh, Panja BPIH Komisi VIII juga memberikan rekomendasi dan catatan tentang komponen BPIH yang bisa diturunkan. Rekomendasi dan catatan itu diperoleh dari berbagai masukan dari masyarakat, hasil RDPU dengan berbagai pihak terkait, dan hasil kunjungan kerja panja BPIH dua kali ke Saudi.

“Saya ingat, kami pernah menutup rapat tanpa hasil dan meminta Kemenag menghitung dan merasionalisasikan angka yang mereka tawarkan. Waktu itu kami menyebut, Komisi VIII akan mengundang rapat lagi jika sudah jelas ada penurunan yang signifikan” papar Politisi dari Fraksi PAN, Dapil Sumut II.

Bahkan rapat konsinyering yang dilakukan di wisma DPR di Kopo Bogor, bersama Kementerian Agama pernah *deadlock* dan terpaksa diskors tanpa hasil. Pasalnya, pada rapat itu



Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay

kementerian agama tidak melakukan perubahan sama sekali atas besaran BPIH. Saran, masukan, dan rekomendasi Komisi VIII pada rapat sebelumnya tidak ditindaklanjuti.

Setelah itu, pemerintah berusaha menurunkan besaran BPIH pada posisi 2982. Namun, usulan itupun ditolak oleh Komisi VIII. Komisi VIII melihat bahwa masih banyak potensi yang bisa dirasionalisasi dan diefisienkan. Bahkan sampai DPR menolak dua daerah pemondakan bagi jamaah haji Indonesia, yaitu Jumaizah dan Raudhah.

Penurunan BPIH baru terasa sangat signifikan pada rapat konsinyering berikutnya. Waktu itu, anggota panja BPIH Komisi VIII meminta agar seluruh penghitungan komponen BPIH dibuka secara transparan dan dihitung secara bersama.

Walau memakan waktu yang sangat lama bahkan hingga

larut malam, panja BPIH Komisi VIII tetap berkuat dan sabar untuk mengkalkulasi ulang.

“Penurunan yang signifikan adalah pada biaya tiket. Garuda bersedia menurunkan harga tiket rata-rata USD 20. Itupun setelah panja BPIH melakukan lobi kepada pihak management Garuda” kata Saleh.

Selain itu, Komisi VIII juga berhasil mendesak pemerintah untuk menurunkan harga pemondokan di Mekkah dan Madinah. Untuk diketahui, pada awalnya pemerintah menawarkan pemondokan di Mekkah rata-rata 6800-7000 riyal, sementara di Madinah rata-rata 720 riyal. Dengan argumen yang sangat rasional, akhirnya pemerintah bersedia menurunkan harga pemondokan di Mekkah menjadi 4500 riyal dan di Madinah 675 riyal. Kalau dikalikan dengan jumlah jamaah haji Indonesia reguler sebanyak 155.200 jamaah, tentu terdapat penurunan yang sangat signifikan.

“Kami juga mendesak menurunkan harga pada komponen-komponen lain seperti biaya cetak buku, penghematan di seluruh embarkasi, biaya persiapan dan rapat-rapat koordinasi, asuransi, dan puluhan item lainnya. Wajar jika kemudian terdapat penurunan yang signifikan,” jelasnya.

Berdasarkan kronologi pembahasan BPIH seperti yang disebutkan di atas, tentu kelihatan jelas bagaimana peran DPR, khususnya Komisi VIII, dalam menurunkan BPIH.

Tentu sangat tidak arif jika kemudian ada klaim sepihak bahwa penurunan itu justru atas pemberian pemerintah.

Pernyataan seperti itu dinilai Saleh sedikit menafikan peran DPR yang bekerja keras untuk merasionalisasi dan mengefisienkan tawaran yang diberikan pemerintah.

“Terus terang, kami bekerja penuh semangat seperti itu karena kami tahu bahwa yang akan dihemat itu uang rakyat dari setoran calon jamaah haji. Kalau itu uang APBN dari kas negara, mungkin boleh saja pemerintah mengklaim. Tapi ini beda. Uang jamaah harus dimanfaatkan secara rasional dan efisien serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka,” pungkas Saleh yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi LN MUI Pusat ini.

Perlu diketahui, bahwa penurunan BPIH tahun ini adalah penurunan yang paling drastis dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Sebagai perbandingan, pada 2010 besaran BPIH adalah USD 3.364. Tahun 2011 turun menjadi USD 3.357, tahun 2012 kembali naik menjadi USD 3.617, tahun 2013 turun menjadi USD 3.527 atau sama dengan tahun 2011, pada tahun 2014 turun menjadi USD 3.219. Dan yang paling besar dan signifikan penurunannya adalah 2015 dimana ditetapkan menjadi sebesar USD 2.717.

“Sebetulnya tidak ada masalah dengan klaim pemerintah seperti itu. Toh pada akhirnya, kawan-kawan di Komisi VIII tetap ikhlas bekerja demi membela kepentingan jamaah. Tinggal kami akan mengawasi serius agar janji pemerintah menaikkan kualitas pelayanan dapat dipenuhi,” tegasnya mengakhiri. (Ayu) foto: dok/parle

Hapus Stigma Negatif PNS

Sekretaris Jenderal DPR-RI Winantuningtyastiti berpesan kepada para pegawai negeri sipil (PNS) yang baru dilantik untuk menghapus stigma negatif PNS. PNS yang sering disebut tidak disiplin, malas dan koruptif harus dijawab dengan kinerja yang baik.

“Tantangan selama ini tidak usah jauh-jauh, di media sering diungkap kalau ada sedikit kekurangan didalam bekerja langsung komentarnya tuh pegawai negeri begitu ya, tidak disiplin, koruptif dan, malas. Karena itu harus dijawab dengan kinerja. Kinerja yang baik yang bertanggung jawab,” katanya usai melantik 69 PNS di lingkungan Setjen DPR, Selasa (28/4).

Menurut Sekjen, harapan dan tantangan masyarakat tersebut, menuntut kita untuk mampu menjawabnya melalui hasil karya nyata. Karena itulah, pentingnya acara pelantikan ini, sebab di sinilah awal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PNS dalam kedudukan masing-masing. “Jadilah pegawai yang memiliki arti dan peran di lembaga, hapus stigma negatif PNS yang malas dan tidak disiplin,” tegasnya lagi.



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti

Lebih lanjut Winantuningtyastiti panggilan akrab Sekjen DPR, banyak hal yang harus dipelajari di lingkungan kerja saat ini. Karena itu, diharapkan para PNS dapat banyak belajar segala sesuatu yang layak dipelajari dan jangan malu bertanya kepada bapak/Ibu yang telah terlebih dahulu menjadi PNS di Setjen DPR-RI.

Sebagai PNS ada kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dimana salah satu tugas yang merupakan kewajiban pokok PNS adalah melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Diharapkan pula para PNS mampu memberikan energi kepada unit kerja di lingkungan masing-masing dengan memberikan *excellent services* kepada institusi ini melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Hal tersebut menurut Winantuningtyastiti, hanya mungkin dilakukan jika setiap diri kita mampu menjadi pribadi yang amanah, kreatif, inovatif, responsif terhadap setiap perubahan yang ada, serta konsisten dalam menerapkan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

“Ini penting karena profesionalisme dan integritas Pegawai di Setjen DPR RI, sebagai bagian dari aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diukur salah satunya melalui parameter tersebut,” ujarnya menambahkan. (mp) foto: denus/parle

Sekjen DPR Lantik 69 PNS



Sekjen DPR memberi ucapan selamat kepada para PNS yang baru dilantik

Sekretaris Jenderal DPR-RI Winaningtyastiti, di Ruang Pustaka Loka Nusantara IV Selasa (28/4) melantik 69 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Setjen DPR. Ke 69 orang tersebut adalah PNS tahun 2012 dan 2014 yang terdiri dari Golongan III/b sebanyak 14 orang, Golongan III/a sebanyak

27 orang, Golongan II/a sebanyak 26 orang, dan Golongan I/a sebanyak 2 orang.

Menurut Win-panggilan akrab Sekjen DPR, setelah melewati masa percobaan sebagai CPNS kemudian diangkat PNS secara penuh sesuai dengan UU No. 8/79 yang telah diubah

dengan undang-undang no.43/97 Pasal 26: Setiap PNS diwajibkan untuk mengangkat sumpah dihadapan atasan pejabat yang berwenang.

Karena itu, pengambilan sumpah dan janji ini adalah hal yang penting karena merupakan ikrar dan sekaligus bukti kesanggupan untuk mentaati aturan yang berlaku yang tidak hanya disaksikan oleh kita semua yang hadir tetapi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

“Acara ini juga sesungguhnya merupakan sebuah penegasan akan komitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta dengan dedikasi yang tinggi,” tegasnya.

Kepada para PNS yang baru saja mengucapkan sumpah, Sekjen DPR berharap dapat mendorong upaya reformasi internal yang sedang dilakukan di Sekretariat Jenderal DPR RI. Reformasi dilakukan karena besarnya harapan serta tuntutan masyarakat terhadap DPR RI yang pro-rakyat, akuntabel, bersih dan berwibawa, sebagai salah satu upaya dalam proses menuju “Parlemen Modern” yang positif. (mp) foto: denus/parle

Sertifikasi Tanah Wakaf, Bagian Solusi Regulasi Tempat Ibadah

Regulasi terkait pendirian tempat ibadah menjadi salah satu topik diskusi antara Sekretaris Daerah Wali Kota Denpasar Rai Iswara mewakili Wali Kota Denpasar saat bertemu dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung Suaka Dharma, Denpasar, Senin sore (27/4).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romli (F-PKB) berpendapat bahwa keberadaan tempat ibadah sebenarnya sudah cukup dengan peraturan yang sudah ada. Sementara regulasi yang khusus justru dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dan menjadi polemik di masyarakat.

“Saya mencontohkan Pura di Bali, selama tidak atas nama siapapun (pribadi) biasanya aman karena kesakralannya orang tidak berani memper-



Anggota Komisi VIII DPR RI Bisri Romli

masalahkannya. Yang penting nomenklatur di kelurahan jelas jika tempat tersebut benar-benar Pura ini untukantisipasi jika suatu saat pada masa

datang ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya,” tukasnya.

Politisi asal Dapil Jateng ini justru mengharapkan masyarakat memanfaatkan salah satu program Kementerian Agama (Kemenag) soal sertifikasi tanah wakaf.

“Di Kemenag itu ada nomenklatur untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf nilainya Rp.2,5juta tapi terakhir (tahun 2014) anggaran tersebut hanya terserap 40 persen, sementara daerah di luar Jawa banyak belum memanfaatkan,” ungkap Bisri.

Ia menambahkan jika setelah diwakafkan dan disertifikasi (atas nama lembaga) maka tidak akan ada lagi potensi sengketa di masa datang. Oleh karena itu dirinya sangat menghargai kalau Mushola, Masjid dan tempat ibadah lainnya diurus persoalan statusnya

sebagai tanah wakaf sehingga tanah tersebut menjadi milik “Allah” (Tuhan) dan tidak bisa diperjualbelikan.

“Tanah atau Masjid (tempat ibadah) yang diwakafkan itu otomatis sudah menjadi milik masyarakat (atas nama lembaga), tidak lagi bisa diklaim milik perorangan dan itu bagian dari regu-

las. Soal misalnya ingin membangun Masjid (tempat ibadah) memang harus ada izin dari masyarakat sekitar itu sudah ada aturannya,” tambah Bisri.

Politisi asal kota batik Pekalongan ini juga menekankan bahwa masyarakat tidak bisa bertindak semaunya sendiri, misalnya ditengah-tengah masyarakat

muslim lalu mau mendirikan Gereja. “Seperti di sini (Bali) yang mayoritas Hindu, masyarakat muslim pun harus mengikuti aturan yang ada jika ingin mendirikan Masjid, supaya lebih tertib dan menghindari adanya konflik antar masyarakat,” pungkas Bisri Romli. (oji)

foto: naefuroji/parle

RUU Minol, Atur dari Hukum Rimba ke Rezim Bermartabat

Forum Legislasi yang digelar di Press Room DPR Selasa (28/4) mengupas mengenai RUU Minuman Beralkohol (Minol) dengan tiga nara sumber yaitu anggota Komisi III DPR Arsul Sani, anggota DPD Fahira Idris dan Ketua KPAI Asrorun Ni'am Soleh.

Selaku pengusul RUU ini, Arsul Sani mengatakan dalam RUU Minol tidak hanya mencakup persoalan atau pengaturan minuman beralkohol produk industri tetapi juga mengatur miras oplosan. Pertimbangan mengajukan RUU ini karena Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dimana ajaran Islam melarang minuman beralkohol yang memabukkan.

Tetapi faktanya, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia sangat bebas dan bisa dikonsumsi siapa saja. “Kita hanya

ingin mengatur dari rezim hukum rimba menjadi rezim yang bermartabat,” tegas Arsul.

Padahal, di negara-negara lain, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Skotlandia dan Australia, ada undang-undang yang mengatur peredaran minuman beralkohol atau minuman keras, sehingga menjadi tertib.

Klasifikasi minuman beralkohol, ujar Arsul, tidak jauh dari Permendag, minol Golongan A yaitu dengan kadar etanol lebih dari 1-5%. Gol. B 5-20% Gol. C 20-55% dan kenapa oplosan juga masuk karena ada klasifikasi minuman beralkohol atau racikan (oplosan). Dalam RUU ada di pasal 8 yaitu pengecualian. Larangan dimaksud tidak berlaku untuk kepentingan terbatas, hanya kepentingan terbatas ini akan diatur dengan PP. Penjelasannya



Suasana Forum Legislasi bahas RUU Minol

adalah, untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi dan tempat2 yang diijinkan peraturan perundangan. Terkait ketentuan pidana dimana membuat minol tanpa ijin dipidana minimal 2 tahun, maksimal 10 tahun plus denda.

Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (GeNam) yang juga anggota DPD, Fahira Idris mengutip data Kementerian Kesehatan tahun 2007, angka konsumsi miras di kalangan remaja sebesar 4,9 persen. Namun melonjak menjadi 23 persen pada 2014 dan apabila dari dulu Indonesia memiliki aturan miras yang jelas maka kondisinya tidak seperti itu.

“Kondisi itu sudah puluhan tahun terjadi dan pemerintah lalai dalam hal ini. Kondisi itu berbeda dengan narkoba yang sudah memiliki UU,” ujarnya. Menurut dia industri bir sa-

ngat massif memasarkan produknya dengan sasarannya para remaja.

Ketua KPAI Asrorun Ni'am menanggapi wartawan bahwa miras sebagai pelengkap acara ritual menegaskan, harus dibedakan antara hal yang faktual dengan yang kita idealkan. Salah satu fungsi UU itu adalah melakukan rekayasa sosial dari sesuatu yang tidak baik -- meski dikenal luas di masyarakat, menuju hal yang baik.

Ada yang faktual di masyarakat soal miras, suatu yang biasa belum tentu benar secara etika, moral maupun hukum. Menjadi bermasalah ketika sesuatu yang biasa di tengah masyarakat tetapi itu salah. “Disinilah fungsi hukum dalam masyarakat yang berbudaya untuk kepentingan tertib sosial dan tertib hukum,” ia menambahkan.

(mp) foto: denus/parle

Komisi VIII Desak Mensos Tajamkan Renstra 2015-2019



Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak

Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk melakukan penajaman arah kebijakan dan program dalam melakukan perbaikan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Ini penting agar sasaran kerja Kemensos ke depan dapat efektif dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial.

“Kita ingin Mensos melakukan penajaman arah kebijakan dan program dengan melengkapi data pemetaan permasalahan kesejahteraan sosial tahun 2016 agar dapat diketahui strategi percepatan apa yang hendak dilakukan oleh Mensos dalam menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak.

Hal ini disampaikan Deding sesuai Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Kamis (24/4) malam, dengan agenda “Rencana Strategis RPJM Kementerian Sosial dalam rangka Memahami Pembahasan APBN 2016.”

Menurut Deding, dalam menyusun program dan kebijakan tahun 2016 Mensos harus memperhatikan secara sungguh-sungguh saran dan pandangan anggota Komisi VIII seperti perlunya memperluas daerah atau wilayah jangkauan yang menjadi sasaran program dan target kinerja. Hal ini juga dengan tetap berpedoman pada data pemetaan yang akurat sehingga realisasi setiap kegiatan dapat tepat sasaran dan mencapai hasil optimal.

Selain itu, Kemensos juga diminta meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sehingga program-program yang memiliki kemiripan jenis dan sasaran bias dihindari dan tidak terjadi tumpang tindih program, kegiatan dan anggaran.

“Dalam konteks itu juga diperlukan penguatan kualitas dan kuantitas potensi sumber daya kesejahteraan sosial sebagai pendamping terhadap pelaksanaan program unggulan di Kementerian Sosial,” ujar Deding sembari menekankan perlunya meningkatkan sosialisasi program prioritas dan program unggulan secara masif.

Komisi VIII mendukung kebijakan Mensos tentang enam jenis program unggulan yang akan digulirkan pada tahun 2016 dalam rangka mengatasi masalah kesejahteraan sosial, namun dengan tetap memperhatikan hal-hal penting yang terkait dengan realisasi program tersebut.

Misalnya, kata politisi Partai Golkar ini, perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sebaran penerima program baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota. Juga menyusun rencana aksi nasional (RAN) yang menjadi program unggulan kemensos tersebut.

“Tak kalah penting adalah melakukan penataan kelembagaan internal Kementerian Sosial untuk meningkatkan kinerja dan menjalankan tugas dan fungsi serta mengefektifkan fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Deding yang juga Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) ini.

Lebih jauh lagi, Komisi VIII ingin Kemensos melakukan sinkronisasi data yang memiliki kemiripan atau kesamaan kegiatan yang dilakukan antar satuan kerja (satker) sehingga dapat dicapai target yang optimal. “Kemensos juga perlu menindaklanjuti berbagai kebijakan dan program yang diamanatkan sesuai dengan amanah undang-undang,” pungkas Deding Ishak. (mp)

foto: andri/parle

Pasca KAA, Politik Luar Negeri Harus Makin Kuat



Suasana Sidang Parlemen Asia Afrika di DPR

Perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 telah ditutup Presiden Jokowi, mengandung tiga dokumen Penting dalam pertemuan negara-negara dua benua itu.

Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Zainuddin mengatakan, politik luar negeri Indonesia harus makin kuat pasca KAA. Berikutnya, Politik luar negeri Indonesia harus menunjukkan keluhuran wibawa sebagai bangsa besar yang merepresentasikan perjuangan negara-negara Dunia Ketiga di Asia dan Afrika.

“Karena itu, politik luar negeri kita setelah ini harus makin kuat dan berwibawa. Karena citra di internasional, Indonesia adalah KAA, dan KAA adalah Indonesia,” ujar Zainuddin di Jakarta, Jumat (24/4).

Menurut Zainuddin, kehadiran KAA yang merepresentasikan kekuatan dunia ketiga ini cukup strategis, serta memberikan posisi tawar politik yang sangat berpengaruh dalam percaturan internasional.

Sebagaimana Gerakan Non-Blok yang juga diprakarsai salah satunya oleh Indonesia, KAA harus mampu mempengaruhi setiap kebijakan global oleh PBB maupun lembaga internasional lainnya, dalam isu kemanusiaan universal, kebebasan, kesejahteraan, keamanan, kebudayaan hingga HAM.

“Pada KAA tahun 1955, pengaruhnya cukup signifikan. Menginspirasi gerakan perjuangan bangsa-bangsa di dunia, mendorong kemerdekaan, hingga diperhitungkan sebagai ancaman bagi kekuatan Barat,” jelasnya.

Dia menambahkan, gelombang KAA mampu melahirkan gerakan Non-Blok di kemudian hari sebagai respons terhadap dua kutub ideologi dunia. “Kita

berharap KAA kali ini tidak sebatas seremonial. Dunia menunggu, ingin melihat gebrakan KAA terhadap tirani global,”katanya

Karena itu, lanjut Ketua DPP PKS ini, kepercayaan peserta KAA untuk menunjuk Indonesia sebagai sekretariat *Asia-Africa Center* secara tidak langsung mendorong politik luar negeri Indonesia agar lebih berperan dan maju dalam menyikapi isu-isu internasional.

“Pemerintah RI harus kaya ide-ide yang akan menjadi ruh dan menghidupkan Pesan Bandung, NAASP dan Deklarasi Palestina. Juga peran aktif dalam membangun kesejahteraan dan perdamaian dunia. Jangan sampai persaingan ekonomi bangsa-bangsa dunia ini mengarah pada perang global yang tanda-tandanya makin jelas,” paparnya

Peringatan KAA 2015 yang digelar di Jakarta berhasil melahirkan tiga dokumen strategis, yaitu Pesan Bandung

(*Bandung Messages*), *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP), dan Deklarasi Palestina.

Pesan Bandung terdiri dari 41 poin. Secara umum, dokumen ini berisi sejumlah kerjasama yang akan dilakukan bangsa-bangsa Asia Afrika, antara lain soal penguatan solidaritas politik, memperkuat kerjasama bidang ekonomi dan mempererat hubungan sosial dan kebudayaan.

Dokumen *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP) terdiri dari 32 poin. Poin terakhir menjelaskan soal komitmen negara-negara Asia Afrika untuk meningkatkan kerangka kerja dalam NAASP itu sendiri. Salah satunya dengan terus mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA) tiap sepuluh tahun dan menyelenggarakan pertemuan para menteri luar negeri Asia Afrika tiap dua tahun sekali di sela-sela sidang PBB di New York. (Si)

foto: *denus/parle*

Luncurkan Produk Baru, Pertamina Diminta Hati-hati

Pertamina harus menjelaskan kepada publik model investasi terhadap rencana peluncuran produk baru bahan bakar minyak (BBM) pada Mei 2015 nanti. Pertamina juga dihimbau berhati-hati mengambil langkah bisnis di hilir migas.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan (dapil Jabar IV) menegaskan hal tersebut, baru-baru ini di Jakarta. “Sebaiknya sebelum menjual produk baru ke pasar, Pertamina harus bisa menjelaskan model investasinya. Selain harus memberikan benefit, model investasinya juga harus dipastikan tidak mengganggu investasi Pertamina yang lain seperti pada bensin ron 88. Pertamina harus berhati-hati dalam memutuskan setiap aksi bisnis di hilir,” tandas Heri.

Seperti diketahui, Pertamina berencana meluncurkan produk BBM baru dengan kualitas di atas premium, tapi di bawah pertamax. Produk yang diklaim ramah lingkungan ini rencananya akan dijual di kawasan pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sementara ini, penjualannya memang masih terbatas. Peluncuran produk ini untuk menjawab rencana penghapusan premium dari pasar.

Politisi muda Partai Gerindra itu

berharap, kajian bisnis di sektor migas harus betul-betul *feasible* dan matang. Pasalnya, Pertamina baru saja mengalami kerugian sebesar 212 juta USD (sekitar Rp2,75 triliun) pada Januari-Februari tahun ini. Ketika itu, harga minyak sedang mengalami tren penurunan tajam, sehingga nilai bahan baku yang diolah dan produk yang diimpor selalu lebih tinggi daripada harga jual.

“Pertamina harus menjelaskan tentang teknis penentuan harga BBM baru tersebut, karena saya kira saat ini Direksi Pertamina sebagai pelaksana penyaluran BBM masih belum jelas kewenangannya dalam menentukan harga BBM. Jika benar BBM baru hanya mengandung kadar oktan yang lebih rendah, maka mestinya bisa dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga jual RON 97 milik Malaysia sebesar Rp7.800/liter,” papar Heri.

Menurut Heri, penentuan harga harus memperhitungkan aspek kuantitas kualitas. Bila harganya diputuskan jauh lebih tinggi, itu patut dipertanyakan. Selain itu, Pertamina juga harus lebih dulu menjelaskan skema dan target pasar untuk produk BBM baru tersebut. “Saya mengapresiasi langkah-langkah Pertamina dalam melakukan



Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan

diversifikasi produk. Namun, hal itu jangan sampai mengabaikan perbaikan sektor hulu yang menjadi faktor kunci permasalahan energi di Indonesia,” harap Heri lebih lanjut.

Data terkini, lanjut Heri, produksi minyak nasional hanya 800-850 ribu barel per hari. Sedangkan, konsumsinya sudah mencapai 1,4 juta barel per hari. Dengan produksi yang rendah itu, niscaya impor BBM akan mencapai Rp1,7 triliun per hari. “Dalam APBN-P 2015, asumsi *lifting* minyak hanya 825 ribu barel per hari. Ini akan berimplikasi pada penurunan laba di sektor hulu yang menjadi penyebab kerugian Pertamina hingga Rp2,75 triliun itu.”

(mh) foto: *iwana armanias/parle*

Kunker Komisi X DPR Bahas Pendidikan di Papua

Dalam masa reses kali ini, Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua di Kota Jayapura. Tujuan dilakukan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual tentang pelaksanaan pembangunan dan permasalahan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga serta perpustakaan di Provinsi Papua.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR, Ridwan Hisyam dalam sambutannya saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua di Kota Jayapura, Papua, Selasa malam (28/4).

Dalam kunjungan kerjanya itu, sejumlah anggota Komisi X DPR ikut serta yakni Asdi Narang (FPDIP), Junico BP Siahaan (FPDIP), My Esti Wijayati (FPDIP), Sofyan Tan (F-PDIP), SB Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), Dwita Ria Gunadi (F-PGerindra), Sri Mellyana (F-PGerindra), Yayuk Basuki (F-PAN), Laila Istiana DS (F-PAN), Krisna Mukti (F-PKB), Lathifah Shohib (F-PKB), Surahman Hidayat (F-PKS), SY Anas Thahir (F-PKS), Anwar Idris (F-PPP), Dadang Rusdiana (F-PHanura).

Saat audiensi dengan Pemprov Papua, Ridwan mengatakan dari sisi legislasi, Komisi X DPR periode 2014-2019 pada tahun 2015 ini akan segera merumuskan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Perbukuan yang telah ditetapkan menjadi RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015.

Terkait bidang anggaran, Ridwan yang juga politisi dari Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa Komisi X DPR periode 2014-2019 akan mendorong dan berusaha agar rencana kerja dan anggaran pemerintah tepat sasaran yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk bidang pengawasan, lanjut Ridwan, Komisi X DPR akan melakukan pengawasan untuk menjamin



Tim Kunker Komisi X saat meninjau sekolah di Papua

pelaksanaan program berjalan transparan dan akuntabel. "Pengawasan untuk meningkatkan daya serap anggaran mitra kerja mencapai 95-100 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan dan pengawasan pelaksanaan program guna mengurangi terjadinya penyimpangan program.

Secara spesifik, kunjungan Komisi X DPR ke Provinsi Papua, kata Ridwan, juga dalam rangka melakukan komunikasi intensif antara DPR khususnya Komisi X DPR dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan lembaga-lembaga masyarakat di Provinsi Papua berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan.

"Sekaligus juga melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang termasuk APBN serta menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemda dan masyarakat di Provinsi Papua," katanya. (nt) foto: nita/parle

DPR Desak Menpora Segera Selesaikan Masalah dengan PSSI



Ketua Tim Kunker Komisi X DPR Ridwan Hisyam

DPR meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) segera menyelesaikan permasalahan dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan stakeholder sepakbola Indonesia.

Seruan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR Ridwan Hisyam kepada Parlemen, di sela kunjungan Komisi X DPR ke beberapa sekolah di kota Jayapura, Papua, Selasa (28/4).

Komisi X DPR, kata Ridwan, saat ini sedang memantau bagaimana dampak terhadap keputusan Menpora yang membekukan PSSI dengan surat keputusannya pada tanggal 17 April yang lalu.

Politisi dari Partai Golkar itu mengungkapkan, pada saat Menpora mengeluarkan keputusan pembekuan terhadap PSSI, Komisi X DPR sudah mengundang Menpora untuk menjelaskan terkait keputusannya itu di DPR.



“Kami (Komisi X DPR-red) sudah mengundang Menpora tapi tidak hadir, karena ada acara KAA di Bandung dan minta waktu diagendakan kembali, kami sudah keburu memasuki masa reses dan baru masuk kembali 17 Mei. Insya Allah pada kesempatan pertama pasca reses, Komisi X DPR akan mengundang kembali Menpora di bulan Mei yang akan datang,” katanya.

Politisi Golkar ini menegaskan, kalau Menpora tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik, pihaknya khawatir FIFA sebagai federasi sepakbola dunia akan memberikan teguran kepada PSSI yang sudah dibekukan dan juga pemerintah karena dianggap intervensi.

Menurut Ridwan, apabila teguran itu tidak ada penyelesaiannya, ia khawatir

sepakbola Indonesia akan disuspend oleh FIFA. “Kalau itu terjadi maka berantakan sudah sepakbola kita, apalagi Persipura Jayapura sekarang ikut Piala AFC, otomatis berhenti juga karena induk organisasinya bermasalah. Apalagi kita juga akan menghadapi Sea Games, Asean Games, serta akan menjadi tuan rumah AFC untuk usia 19 dalam waktu dekat,” ujarnya. (nt) foto: nita/parle



Anggota Komisi VIII DPR RI Asli Chaidir

Anggota Komisi VIII DPR RI, Asli Chaidir mengapresiasi kerja BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah membangun jembatan bailey (belly) di desa Rebo Kecamatan Merawang.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja BPBD Babel ini yang telah membangun jembatan bailey (belly) di desa Rebo. Meski anggaran pembuatan ini tidak berasal dari dana BPBD melainkan dari APBD Provinsi kepulauan Babel namun BPBD mampu membangun jembatan itu dengan SDM nya sendiri atau tanpa bantuan pihak lain,” ungkap Chaidir.

Komisi VIII Apresiasi BPBD Babel

Ditambahkannya, beberapa waktu lalu desa ini terjadi longsor yang salah satunya menyebabkan jembatan permanen yang sudah berusia puluhan tahun itu ambruk. Akibatnya warga sempat terisolir karena memang jembatan itu yang menghubungkan desa Rebo dengan desa lainnya.

Untuk menghemat waktu ketika itu, BPBD berinisiatif untuk menggantinya dengan jembatan bailey (belly). Jembatan bailey merupakan jembatan rangka baja ringan dan berkualitas tinggi, yang bisa dipindah-pindahkan dan juga sangat cepat pemasangannya.

“Selama ini BNPB (badan nasional penanggulangan bencana) memang telah membekali anggotanya dengan berbagai keahlian, termasuk pelatihan-pelatihan teknis. Dengan demikian ketika terjadi bencana dapat langsung bergerak mengatasinya dan meminimalisir korban. Komisi Delapan tentu sangat mendukung hal itu,” pungkas politisi Fraksi PAN ini. (Ayu) foto: ayu/parle

Fasilitas Pendidikan di Papua Perlu Perhatian Khusus

Komisi X DPR meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terkait fasilitas penunjang pendidikan dan sistem belajar mengajar di Provinsi Papua. Sebab, Papua dianggap salah satu provinsi yang tingkat index peringkat pendidikannya dinilai cukup rendah.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR, Ridwan Hisyam, kepada Parlemenaria usai melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Provinsi Papua, Jayapura, Selasa (28/4).

“Kami melihat bahwa Provinsi Papua dalam hal pendidikan termasuk yang

tertinggal. Index yang kita lihat peringkatnya cukup rendah, oleh karena itu Komisi X DPR datang kesini untuk melihat secara langsung dan tentunya nantinya pada saat kita rapat kerja dengan Menteri Pendidikan masalah-masalah ini akan kita angkat,” kata Ridwan.

Politisi dari Partai Golkar itu juga mengungkapkan, fasilitas penunjang pendidikan seperti perpustakaan dinilainya juga sangat minim. Sejumlah perpustakaan di beberapa sekolah di Provinsi Papua masih dalam proses perbaikan, bahkan sudah dua tahun sekolah-sekolah di Provinsi Papua

belum mendapatkan buku-buku dari pemerintah pusat.

“Ini juga masukan buat kami agar Perpustakaan Nasional RI memperhatikan daerah-daerah yang cukup jauh dari Jakarta supaya tidak terjadi diskriminasi pendistribusian buku-buku yang dari pusat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan juga mengomentari soal penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Ia berharap penyelenggaraan UN bisa lebih baik dan dapat dilaksanakan secara nasional.

“Saat ini memang UN secara online masih dalam taraf uji coba, karena masih belum semuanya bisa melak-



Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam disambut oleh para siswa SMA di Papua

sanakan UN secara *online*. Kami mendorong agar UN bisa dilaksanakan secara nasional,” katanya.

Seperti halnya di Provinsi Papua, kata Ridwan, baru sembilan sekolah yang mampu melakukan UN secara *online*. “Saya kira masih sangat rendah sekali masalah fasilitas ini. Nanti kita akan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, agar segera dipersiapkan peralatan-peralatan penunjang UN secara online di provinsi ini,” jelasnya.

Kunjungan kerja Komisi X DPR ke Provinsi Papua dalam masa reses kali ini diikuti sejumlah anggota Komisi X DPR, yakni Asdi Narang, Junico BP Siahaan, My Esti Wijayat, Sofyan Tan, SB Wiryanti Sukamdani dari F-PDIP, Dwita Ria Gunadi dan Sri Mellyana dari F-PGerindra), Yayuk Basuki dan Laila Istiana DS (F-PAN), Krisna Mukti dan Lathifah Shohib (F-PKB), Surahman Hidayat dan SY Anas Thahir (F-PPK), Anwar Idris (F-PPP) serta Dadang Rusdiana (F-PHANura). (nt) foto: nita/parle

Pesantren Pusat Perjuangan Bangsa

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dipimpin Deding Ishak menggelar pertemuan dengan jajaran Kanwil Kemenag Sulawesi Barat, di Mamuju, Selasa (28/4).

Kakanwil Prov. Sulbar, Muhdin menerangkan bahwa kerukunan umat beragama di Sulbar terbina dengan baik selain dikarenakan program kepedulian lintas agama yang dijalankan, juga dikarenakan bersama-sama melestarikan kearifan lokal disamping hukum formal. Misalnya adanya ketentuan membayar seekor kerbau jika terlibat perselisihan berdarah.

Pertemuan juga diisi dialog dengan para guru agama, pemuka agama dan tokoh masyarakat dipandu oleh Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Hanifa

Di forum ini, mengemukakan aspirasi dari Adnan Nota, salah satu pemimpin pesantren yang prihatin karena dihuni ribuan santri, tetapi tidak punya lembaga ekonomi mandiri. “Kami mengharapkan setiap pondok pesantren mempunyai wakaf produktif untuk kerajinan lokal dan mengembangkan usaha pertanian,” ujar Adnan.

Menurutnya, keadaan dimana pesantren yang berdiri secara mandiri dan berjalan secara mandiri sama



Tim Kunker Komisi VIII saat mengadakan pertemuan dengan Kanwil Kemenag Sulbar

sekali tidak mempunyai ketergantungan pada pemerintah menimbulkan stigma negatif terhadap pesantren. Yaitu isu sarang teroris seiring peristiwa yang menyangkut organisasi ISIS belakangan ini.

Menanggapi hal ini Deding Ishak meminta perhatian pemerintah terhadap pesantren sebagai aset negara, bukan disoroti sebagai sarang teroris. “Pesantren adalah pusat perjuangan

bangsa. Sejarah mencatat pesantren-pesantren telah ikut aktif memerdekakan bangsa ini dan secara aktif mengisi kemerdekaan negara ini.” tegasnya.

Untuk itu diharapkan pemerintah berperan aktif membina bukan sekedar kurikulum pendidikannya, tapi juga untuk sisi pembiayaan, salah satunya dengan jalan bantuan wakaf produktif.

(ray) foto: rizka/parle



Sulut Selalu Dapat Anggaran Besar untuk Infrastruktur

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) selalu mendapat anggaran cukup besar untuk membangun infrastruktur. Sebagai wilayah kepulauan, banyak proyek jalan, jembatan, pelabuhan, sampai bandara perintis dibangun.

Demikian dikemukakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V ke Sulut Lasarus (dapil Kalbar), saat melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulut di Manado, Senin malam (27/4). Apalagi saat ini pemerintah pusat sedang menggiatkan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur dan telah mencanangkan pembangunan tol laut. Sulut termasuk mendapat alokasi anggaran yang besar untuk provinsi di kawasan timur.

“Daerah-daerah yang dikunjungi Komisi V DPR RI selalu mendapat prioritas anggaran dari APBN,” ungkap Wakil Ketua Komisi V itu. Saat ini Pemerintah Provinsi Sulut memang sedang giat membangun infrastruktur jalan. Setidaknya ada tiga proyek infrastruktur yang ditinjau langsung oleh Komisi V, yaitu tol Bitung-Manado, jalan *bypass* Kairagi-Bengkol, jalan SBY-Matungkas, hingga jembatan Soekarno.

Belum lagi ada proyek peremajaan kapal penumpang antarpulau, rehabilitasi Pelabuhan Manado, dan juga Pelabuhan Bitung. Ini semua, kata Lasarus, bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulut. Apalagi Sulut punya banyak kawasan wisata yang menarik. Dengan pembangunan infrastruktur akses menuju kawasan wisata semakin mudah dan cepat.

Sementara pengadaan dan peremajaan kapal justru untuk menjembatani angkutan antarpulau. Di Sulut banyak sekali pulau-pulau kecil yang terpencil dan terluar. Dengan peremajaan kapal, para penduduk yang tinggal di pulau-



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V Lasarus saat bertukar cinderamata dengan Wakil Gubernur Sulut

pulau terpencil itu tidak terisolasi. Dengan anggaran ini, negara hadir melayani rakyatnya.

Kepada Pemerintah Provinsi Sulut, Lasarus juga selalu mengatakan, Komisi V siap menampung aspirasi bila ada usulan penambahan anggaran infrastruktur. Tim Komisi V yang ikut meninjau infrastruktur ke Sulut adalah Michael Wattimena, Sadarestuwati, Moh Nizar Zahro, Andi Iwan Darmawan Aras, Umar Arsal, Agung Budi Santoso, Anton Sukartono Suratto, Bahrum Daido, Yasti Soepredjo Mokoagow, Peggi Patricia Pattipi, Abdul Hakim, Nurhayati, Wardatul Asriah, Ahmad Ali, dan Fauzih Amro. (mh) foto: husen/parle

Komisi V Tinjau Pelabuhan Bitung



Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI saat meninjau kapal penumpang di Pelabuhan Bitung

Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara (Sulut) sedang berbenah, tidak saja sarana fisiknya tapi juga kapal-kapal angkutnya yang sudah tua diremajakan kembali, bahkan sudah disediakan anggaran untuk pengadaan kapal baru dengan kapasitas yang lebih besar.

Tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang dipimpin Lasarus (dapil Kalbar), meninjau langsung Pelabuhan Bitung untuk melihat dari dekat fasilitas yang ada, proyek yang sedang dikerjakan, dan kendala pembangunan apa saja yang ada di pelabuhan tersebut. Banyak kapal barang dan penumpang sedang bersandar di dermaganya. Saat Komisi V meninjau ke pelabuhan tersebut, tak ada kesibukan berarti.

Pelabuhan Bitung sudah memiliki program jangka pendek pengembangan (2015-2019). Otoritas pelabuhan menjelaskan, di antara program jangka pendek itu adalah penambahan panjang dermaga, reklamasi, penambahan peralatan bongkar muat, dan penguatan organisasi kesyahbandaran pelabuhan. Untuk jangka panjang (2020-2024) ada program relokasi pelabuhan penyeberangan ferry, reklamasi areal belakang dermaga, membuat penghubung antara *causeway* dengan dermaga, dan membangun fasilitas terminal penumpang.

Usai meninjau pelabuhan, tim Komisi V melihat kapal penumpang yang kebetulan sedang bersandar. Tim berkesempatan masuk ke dalam kapal untuk melihat fasilitas di dalam kapal dan keadaan para penumpang. Tim melihat kamar-

kamar penumpang yang tampak luas, ruang nahkoda, dan ruang cafe. Lasarus sempat bernyanyi untuk menghibur para awak kapal dan tamu.

Usai bernyanyi, Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Komisi V DPR telah menyetujui alokasi anggaran Rp3 triliun dari APBN dengan sistem *multiyears* untuk pengadaan kapal-kapal baru yang lebih besar. Kelak tak ada lagi kapal kecil dan tua. Semua kapal bisa terus berlayar lebih lama dan para pelaut terbaik Indonesia bisa melaut menga-

rungi pulau-pulau di Nusantara.

Dengan pengadaan armada kapal baru, masyarakat pengguna moda transportasi laut di pulau-pulau terpencil dan terluar juga bisa terlayani dengan baik. Masih di kawasan Pelabuhan Bitung, Komisi V juga menyempatkan diri melihat kapal baru milik BASARNAS yang sedang bersandar. Kapal ini untuk armada BASARNAS di kawasan timur Indonesia, untuk kegiatan evakuasi korban bila terjadi kecelakaan transportasi di laut. (mh) foto: husen/parle

KTI Perlu Pertumbuhan Ekonomi Yang Lebih Tinggi



Tim Kunker Komisi XI DPR saat mengadakan pertemuan dengan Gubernur NTT

Komisi XI DPR RI menyoroti pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan kawasan lain di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi XI I.G.A Rai Wirajaya saat pertemuan dengan Gubernur NTT Frans Lebu Raya beserta jajaran, di Kantor Pemkot Kupang, Senin (27/4/2015).

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) Kawasan Timur Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Kuartal pertama 2014 kawasan timur Indonesia

tumbuh 4,7%, kuartal kedua tumbuh 4,9%, dan kuartal ketiga tumbuh 5,1%. "Tren yang terus naik ini lebih baik dibandingkan Pulau Jawa yang stabil dan Pulau Sumatera yang cenderung menurun," kata Rai. Akan tetapi, sambungnya, kondisi Kawasan Timur Indonesia yang masih relatif tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Hal ini penting untuk mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan secara nasional pada tahun 2015 sebesar 5,7%," ujar Rai seraya menambahkan tentu saja pertumbuhan

ekonomi itu harus diimbangi dengan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Ia berharap APBN dan APBD benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia fisik maupun mentalnya.

Sementara Gubernur NTT Frans Lebu Raya menjelaskan pertumbuhan ekonomi di NTT lebih banyak digerakkan oleh aktivitas konsumsi, sehingga fondasi ekonomi yang tercipta kurang kokoh dalam jangka menengah dan jangka panjang. Kenyataan tersebut berpengaruh juga pada kondisi kesejahteraan penduduk. Akibatnya angka kemiskinan penduduk masih tinggi yaitu 19,60% pada bulan September 2014.

Menurutnya, tingginya angka kemiskinan diakibatkan oleh rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, tingginya pengangguran terselubung, belum berkembangnya sektor riil, rendahnya pertumbuhan dan produktivitas usaha kecil menengah.

"Secara administratif Provinsi NTT terbagi dalam 22 kabupaten/kota, 306 kecamatan, 319 kelurahan dan 2.951 desa. Komposisi jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten/kota sangat menentukan kemampuan dalam pengelolaan pembangunan," ujar Frans menambahkan. (iw) foto: iwan armanias/parle

Haji Cukup Satu Kali

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Aminuddin menegaskan akan tetap mengusulkan jatah haji setiap warga sekali seumur hidup. Hal tersebut di-

ungkapkan saat kunjungan ke Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (27/4/2015).

Langkah ini, lanjut Hasan, untuk me-

ngatasi daftar tunggu haji yang sangat panjang. Ia berharap agar Kementerian Agama RI berani untuk melakukan pemberlakuan syariat. Artinya, peme-



rintah hanya akan memberangkatkan calon jemaah yang belum pernah menjalankan ibadah haji ke tanah suci.

“Daftar tunggu dua juta sedangkan kuota Indonesia hanya 165.000 setahun. Dengan kondisi itu orang harus menunggu hingga 12 tahun. Sehingga tidak sedikit yang putus asa dan akhirnya enggan mendaftarkan haji,” kata Politisi dari Fraksi Nasdem ini.

Oleh karena itu, Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama RI, berani untuk memberlakukan bahwa haji cukup sekali seumur hidup. Sementara Haji kedua dan ketiga merupakan sunnah. (Ayu) foto: ayu/parle



Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Aminuddin bersama Tim Kunker di Bangka Belitung

Bangka Minta Dukungan Komisi VIII Dirikan Asrama Haji



Anggota Komisi VIII Hamka Haq dan Gubernur Babel

Komisi VIII DPR RI menemukan sejumlah permasalahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama yang terkait dengan mitra kerjanya, Kementerian Agama.. Hal tersebut terungkap saat Komisi ini mengunjungi provinsi yang merupakan hasil pemekaran, Senin (27/4).

“Kami sengaja di masa reses datang ke provinsi ini untuk mengetahui ber-

bagai permasalahan yang terjadi di sini, terutama yang terkait dengan mitra kerja kami, salah satunya Kementerian Agama,” ujar anggota Komisi VIII, Hamka Haq yang memimpin Tim rombongan.

Dijelaskan Hamka, permasalahan tersebut diantaranya belum adanya asrama haji di provinsi yang terdiri dari tujuh kabupaten itu. Padahal dari

sekitar 1.700 penduduknya, sebanyak 1.100 beragama muslim. Kuota haji yang diterima provinsi ini pun tidak sedikit yakni sekitar 730 orang dalam tiga tahun terakhir, bahkan sebelumnya kuota haji provinsi ini sekitar 903 orang.

“Selama ini jemaah haji di provinsi ini dikumpulkan di halaman kantor Kanwil Kemenag untuk kemudian diberangkatkan secara langsung ke embarkasi di Sumatera Selatan,” jelas Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Tidak hanya itu, Komisi VIII juga menerima aspirasi terkait penambahan KUA (Kantor Urusan Agama). Dari 47 kecamatan yang ada, 7 kecamatan belum memiliki KUA. Padahal sejak pemerintah membebaskan biaya nikah di KUA, permintaan nikah di KUA cukup tinggi.

Lebih lanjut Hamka yang didampingi anggota komisi VIII lainnya seperti Arzeti Bilbina, Asli Chaidir, Amrullah amri Tuasikal, Hasan Aminuddin, Moh Iqbal Romzi, Muslich, Syamsul Lutfi, dan A'nim F Mahrus mengatakan akan segera mendiskusikan permintaan pembangunan asrama haji itu kepada seluruh koleganya di Komisi VIII untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama RI. (Ayu) foto: ayu/parle

Komisi IV Tinjau Perkebunan Gambir di Pesisir Selatan



Tim Kunker Komisi IV saat berkunjung ke Sumatera Barat

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau perkebunan Gambir di Nagari Siguntur, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar. Salah satu produk pertanian yang berhasil mengisi pasar ekspor ini dinilai belum dikelola optimal.

“Kita sudah mendengar paparan Pak Bupati, tanaman Gambir ini dikelola masyarakat turun temurun dan berhasil membuka pasar ekspor. Ha-

rapannya produksi dapat ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitas, ini yang ingin kita lihat di sini,” kata Ketua Tim Kunker, Herman Khaeron usai meninjau lokasi, Senin (27/4/14).

Ia menambahkan ekstrak daun gambir ini dilirik kalangan industri sebagai bahan pewarna, menyamak kulit bahkan di Jerman dikembangkan sebagai bahan obat. Dalam kunjungan lapangan ini Herman yang juga Wakil

Ketua Komisi IV berdialog dengan Wali Nagari dan para petani Gambir. Turut dalam rombongan komisi yang membidangi pertanian ini diantaranya, I Made Urip (FPDIP), Ichsan Firdaus (FPG) dan Cucun Ahmad Syamsurizal (FPKB).

Pada bagian lain anggota Tim Kunker dari FP Gerindra, Oo Sutisna menilai masyarakat memerlukan dukungan peralatan agar dapat mengolah Gambir menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Ia mengaku siap memberikan dukungan agar pemerintah menyiapkan anggaran untuk pengadaan peralatan ini.

“Petani Gambir ini perlu peralatan dengan teknologi *advance*-lah tapi tentu yang bisa mereka gunakan. Jadi perlu pelatihan, buat apa diberi dukungan peralatan tapi kemudian tidak berfungsi,” tekannya.

Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit yang mendampingi dalam kunjungan tersebut menjelaskan produksi Gambir di daerahnya pernah mencapai 11.764 ton pada tahun 2010 lalu. Setelah itu terus menurun sampai mencapai angka 3000 ton lebih. Ia berharap dukungan Komisi IV agar produk andalan ekspor ke Asia Tengah dan Barat ini dapat kembali berjaya. (iky) foto: *ibnur khalid/parle*



Ketua Tim Kunker Komisi IX Ermalena bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

Komisi IX DPR Apresiasi Sumbar Alokasikan Anggaran Kesehatan di atas 10 Persen

Pimpinan rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Ermalena menjelaskan, yang jadi fokus pembahasannya dalam kunjungan kerja ke Sumatra Barat (Sumbar), terkait bidang kesehatan, BPJS dan Ketenagakerjaan.

“Pertama untuk Bidang Kesehatan. Kita memberi apresiasi pada Sumbar, karena memang anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan itu sudah di atas 10 persen. Ini luar biasa,” terang Ermalena saat berdialog dengan gubernur



Sumbar dan jajaran di aula gubernuran, Senin (27/4/2015).

Terkait dengan BPJS, Ermalena mengatakan, dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan Tuah Sakato dan dituangkan ke dalam Perda, Sumbar telah selangkah lebih maju.

“Kita mengetahui tentang Sumbar, ada Perda tentang Jaminan Kesehatan Tuah Sakato. Ini luar biasa yang dilakukan yang memberikan jaminan kesehatan gratis pada masyarakat di Sumbar,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Ermalena, yang jadi masalah memang BPJS Tenaga Kerja, karena tenaga kerja di sektor industri

juga terbatas di daerah ini. “Memang kondisi ketenagakerjaan sangat terbatas. Sehingga memang, menjadi catatan tersendiri bagi kami di DPR,” jelasnya.

Bersama Ermalena, kunker yang berlangsung selama 5 hari itu juga didampingi Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur (F-PAN), Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), Abidin Fikri (F-PDIP), Alex Indra Lukman (F-PDIP), Daniel Lumban Tobing (F-PDIP), Adies Kadir (F-PG), Dewi Asmara (F-PG), Putih Sari (F-GERINDRA), Suir Syam (F-GERINDRA), Khaidir (F-GERINDRA), Siti Masrifah (F-PKB), Marwan Dasopang (F-PKB), Ansory Siregar, (F-PKS), dan Ali Mahir (F-NASDEM). (andri) foto: andri/parle

Komisi VIII Apresiasi FKUB Provinsi Bali

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali sebagai inisiator sekaligus contoh nasional dalam membangun kebersamaan dan kedamaian antar umat beragama dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika di Indonesia.

Demikian salah satu poin yang mengemuka dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Ke Provinsi Bali pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 dengan Gubernur Bali yang diwakili Asisten I Bidang Ekonomi dan Kesda, I Ketut Wija, Pimpinan DPRD, Kakanwil Kemenag, Kadinsos, Kepala BPBD, Kepala Bazda, Kepala Badan PPPA, Kepala BWI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Provinsi Bali serta jajaran, Senin (27/4).

Dalam perannya yang cukup sentral tersebut, ternyata FKUB Provinsi Bali pada Tahun 2015 ini hanya mendapat anggaran Rp.50 juta dan itupun dalam bentuk barang.

Hal ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid. Menurut politisi PKS tersebut, kecilnya anggaran yang diperoleh FKUB Bali sangat tidak sebanding de-



Anggota Komisi VIII Hidayat Nur Wahid

ngan perannya yang cukup sentral yaitu membangun kerukunan antar umat beragama.

“Dengan anggaran sekecil itu apakah FKUB bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal selama ini,” tukas Hidayat.

Politisi yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini juga prihatin dengan kondisi kerukunan umat beragama saat ini yang mulai rapuh karena melupakan nilai-nilai keberagaman sesuai falsafah kita Bhineka Tunggal Ika di Indonesia.

Di lain pihak, Ketua FKUB Provinsi Bali, Dewa mengakui minimnya anggaran yang diterima FKUB yang pada Tahun 2014 Rp.30 juta lalu Tahun 2015 meningkat hanya Rp 50 juta. “Anggaran itupun tidak dalam bentuk uang tapi barang,” tukas Dewa.

Namun demikian, penggiat FKUB cukup optimis karena pada Tahun yang akan datang (2016) Gubernur Bali akan mengalokasikan Rp.500 juta dari APBD untuk mendukung kinerja FKUB Bali. “Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh SKPD, sementara FKUB bisa mengajukan proposal jika akan mengadakan kegiatan,” jelas I Ketut Wija

Di akhir pertemuan Komisi VIII DPR RI secara simbolis menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat (BNPB) kepada Pemprov Bali berupa 1 set perahu lipat untuk penanggulangan bencana.

Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid dengan anggota antara lain Fathan, Erwin Moeslimin Singajuru, Rachmat Hidayat, Djalaludin Rahmat, Muhammad Lutfhi, H.Anda, Linda Megawati, Bisri Romli, Hidayat Nur Wahid, Achmad Fauzan Harun, Hj. Tri Murny, Lalu Gede Syamsul Mudjahidin. (oji) foto: naefuroji/parle

Komisi IV Gali Informasi Dari Gubernur Sumbar

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan yang berlangsung tiga hari (27-29 April) mendapat sambutan dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

“Terima kasih Pak Gubernur yang telah secara khusus menyambut kami. Harapannya tim mendapat informasi

akurat tentang kemajuan daerah ini terutama di bidang pertanian, kelautan perikanan, peternakan yang menjadi bidang Komisi IV,” kata Ketua Tim Kunker Herman Khaeron dalam pertemuan di Gubernuran, Padang, Sumbar, Senin (27/4/15).

Politisi Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi IV ini menam-

bahkan sudah mendapat informasi tentang potensi tanaman gambir yang terlupakan dan budidaya ikan laut dan tawar di Pesisir Selatan. Peternakan sapi di Padang Mangopoh serta sejumlah kemajuan lain di daerah ini, terutama yang mendapat anggaran dari APBN.

Dalam paparannya Gubernur Ir-



wan Prayitno menjelaskan sejumlah kemajuan yang telah diperoleh daerahnya diantaranya tercapainya target swasemda, peningkatan produksi padi 5 persen setiap tahunnya. Ia juga menyebutkan keberhasilan distribusi pupuk kepada petani dengan melibatkan Babinsa TNI.

“Karena distribusi pupuk terjaga, panenpun meningkat dari 5 ton/hektar menjadi 8 ton/hektar,” papar dia. Ia juga meminta dukungan dari Komisi IV agar upaya menjadikan hasil petani dan nelayan memiliki nilai tambah sehingga dapat memberikan pendapat-an lebih. (iky) foto: ibnur khalid/parle

Ketua Tim Kunker Komisi IV Herman Khaeron bersama Gubernur Sumbar

Perlu Ubah Strategi Tarik Investor di Kepri

Investor masih enggan melakukan investasinya di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu perlu mengubah strategi yang selama ini diterapkan, sehingga dapat menarik para investor untuk menanamkan investasinya di Kepri.

Demikian dikatakan Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, usai bertemu dengan Gubernur Kepri dan jajaran, dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VI ke Kepri, di Graha Kepri Batam Senter, Senin (27/4).

“Kita masih belum membuat investor senang dan aman untuk berinvestasi di Indonesia. Nah faktor ini yang harus kita hilangkan. Misalnya keamanan dan dukungan infrastruktur yang memadai harus kita tingkatkan,” kata Hafisz.

Politisi F-PAN ini menambahkan, mengapa Indonesia masih tertinggal dibanding negara, apalagi Kepri yang secara jarak tidak terlalu jauh dengan Singapura, karena Singapura sudah mempunyai dukungan infrastruktur yang mampu mengundang investor.

“Singapura sudah mempunyai lahan yang mempunyai dukungan sarana dan prasarana, seperti jaringan air bersih, listrik, bahkan internet pun sudah disiapkan. Ini yang tidak bisa kita berikan kepada investor untuk melakukan investasinya di Batam,” tambah Hafisz.

Oleh karena itu, tambah Politisi asal Dapil Sumsel I ini, Indonesia mengubah strategi dalam rangka mengundang investor, bukan hanya menyediakan lahan, tapi juga bahwa menggarisbawahi bahwa infrastruktur itu juga penting.

“Sejalan dengan itu, maka Pemerintah memang harus mendahulukan infrastruktur di atas segalanya pada sesi pembangunan kali ini. Otorita Batam juga harus melakukan hal yang sama, agar investor yang selama ini tinggal di Singapura mau pindah ke Batam. Karena jarak yang tidak ter-



Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir menerima cinderamata dari Gubernur Kepri

lalu berbeda dan investasi di sini jauh lebih murah dibanding Singapura,” jelas Hafisz yang dalam kesempatan ini juga menjadi Ketua Tim Kunker.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Muhammad Sani menyampaikan selama ini banyak persoalan dihadapi Kepri. Salah satunya mengenai pasokan listrik yang masih kurang mencukupi. Masalah *connectivity*, berupa transportasi antar daerah juga masih kendala, mengingat Kepri sebagian besar wilayahnya adalah kepulauan.

“Perlunya penambahan transportasi seperti kapal untuk bisa menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Soal ketersediaan pasokan gas yang dihasilkan Kabupaten Natuna juga harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan listrik untuk di Kepri,” jelasnya.

Sebagai wilayah yang menyanggah status *Free Trade Zone*



(FTZ), Sani juga mengakui masih ada kendala mengenai kebijakan bahan kebutuhan pokok. Ia meminta Pemerintah Pusat bersedia membuka kran impor kebutuhan pokok.

Dalam kesempatan Kunjer ke Kepri ini, turut hadir pula beberapa Anggota Komisi VI, yakni Eriko Sotarduga, Ir-

madi Lubis, dan Indra Simatupang dari F-PDI Perjuangan. Berikutnya dari F-Gerindra ada Khilmi dan Abdul Wachid, Dwie Aroem Hadiyah (F-PG), Sartono Hutomo (F-PD), Nasril Bahar (F-PAN), Nasim Khan (F-PKB), Iskandar D Syaichu (F-PPP), dan Nyat Kadir (F-Nasdem). (sf) foto: sofyan/parle

DPR Minta Benahi Layanan BPJS Kesehatan



Tim Kunker Komisi IX saat mengadakan Pertemuan di Sumbar

Komisi IX DPR RI meminta BPJS untuk tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi sampai dipingpong petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam saat kunjungan kerja ke RSUD Padang Panjang, Bukittinggi, Sumbar, Selasa (28/4). "Puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar pada masyarakat perlu membenahi diri. Sehingga ketidakmampuan puskesmas memberikan pelayanan pada masyarakat tak membuat masyarakat dirugikan," tegas.

Saat ini, katanya memang puskesmas harus mampu

menangani 155 diagnosa penyakit. Sementara kondisi puskesmas masih jauh dari harapan. Baik sumber daya manusia maupun peralatannya.

"Sehingga, ketika puskesmas tak mampu menangani, langsung pasien dipindahkan ke rumah sakit. Sementara, saat di rumah sakit, BPJS tak mau menalangnya dengan alasan penyakitnya masih dapat ditangani puskesmas," ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, tentu saja, masyarakat yang dirugikan. Harus bolak-balik dari puskesmas ke rumah sakit dan kembali lagi ke puskesmas.

"Kebijakan itu harus dihapus. Pembenahan terhadap sarana puskesmas harus dilakukan, termasuk sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang bertugas di tempat itu. Kebijakan tersebut, tentu hanya akan menyengsarakan masyarakat," ujar mantan Wali Kota Padangpanjang ini.

Ketika puskesmas tak siap dengan itu, katanya, harus dilakukan pembenahan terhadap sarana dan sumberdayanya. "Paling tidak, aturan tersebut tak harus kaku. Kalau kaku, maka akan menyengsarakan masyarakat," ingatnya.

Suir Syam juga menyoroti panjangnya daftar antrean pasien BPJS yang berobat ke rumah sakit rujukan milik pemerintah. Seharusnya, BPJS juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta.

Menurutnya, ada kecenderungan sedikit berbeda di Sumbar dibandingkan daerah lain. Bila di daerah lain pihak swastanya tidak proaktif diajak kerja sama dengan BPJS, namun di Sumbar malah sebaliknya.

"Seharusnya, BPJS juga bisa menjalin kemitraan dengan RS Swasta di Sumbar. Dengan menjalin kemitraan banyak rumah sakit, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik," jelasnya. (andri) foto: andri/parle



Anggota Komisi V DPR RI Agung Budi Santoso

Infrastruktur Sulut Semakin Membaik

Infrastruktur di Sulawesi Utara (Sulut), kini terlihat semakin membaik. Tidak saja membangun jalan baru, tapi juga jembatan dan pelabuhan dibangun bersamaan. Ini tentu berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat setempat.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Agung Budi Santoso (Jabar I), Rabu (29/4) di Manado saat

mengikuti kunjungan kerja Komisi V ke Sulut. "Secara garis besar pembangunan di sini sudah bagus. Banyak peningkatan infrastruktur di Sulut. Banyak pula anggaran APBN yang dibawa ke Sulut ini," ungkap Anggota F-PD itu.

Kalau pun ada sedikit kendala di lapangan, itu hanya pembebasan lahan yang belum rampung. Pemerintah

Sulut, nilai Agung, juga sudah cukup tanggap memberi perhatian pada kebutuhan infrastrukturnya. Apalagi, Sulut merupakan wilayah kepulauan yang bagian utaranya berbatasan langsung dengan nagara Filipina.

Anggaran dan perhatian ke Sulut, memang, seiring dengan program pemerintah pusat yang ingin menggalkan pembangunan ke wilayah timur Indonesia. Di pulau Sangihe, lanjut Agung, pulau paling utara Indonesia

yang berbatasan dengan Filipina, terus membaik kondisinya. Ekonomi warga setempat kian maju seiring perbaikan infrastruktur di sana.

Sementara itu berbicara soal rencana pembangunan bandara perintis untuk menjembatani transportasi antarpulau di Sulut, Agung memandang perlu pembangunan tersebut. Pembangunan bandara perintis itu konteksnya untuk memperkuat NKRI. Di Sangihe perlu dibangun bandara

perintis agar masyarakat betul-betul terlayani dengan baik.

“Kita bicara untuk kesatuan NKRI. Semua harus dipikirkan. Pemerintah harus berperan. Penerbangan perintis mungkin tidak membawa profit. Tapi, tetap harus ada di situ untuk melindungi dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus hadir di situ, tandas Agung lebih lanjut. (mh)

foto: husen/parle

Komisi IV Minta Rencana Detil Penggunaan Kawasan DPCLS Provinsi Babel



Tim Kunker Komisi IV DPR di Bangka Belitung

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), untuk mendapatkan masukan serta informasi sehubungan dengan permohonan Menteri Kehutanan kepada DPR terkait perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta strategis (DPCLS) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Babel.

Komisi IV menginginkan pengambilan keputusan persetujuan terkait perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS dalam revisi RTRWP Babel dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.

Untuk itu, Komisi IV meminta Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Babel memberikan data rencana detail penggunaan kawasan yang DPCLS. “Tugas

Komisi IV adalah menilai disahkan atau tidak disahkan yang dimohonkan, selanjutnya akan dibahas dalam rapat Komisi dengan tambahan data-data rencana detail penggunaan kawasan DPCLS, setelah itu akan disetujui oleh DPR,” kata Wakil Komisi IV Ibnu Murtazam, di gedung Gubernur Kepulauan Babel, Selasa (21/4), saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder kehutanan.

Menurutnya, Komisi IV tidak menginginkan dalam kawasan tersebut tersembunyi untuk tambang atau dimanfaatkan oleh pengusaha. “Sepele-nyetahuan DPR hanya fasum dan fasos, ada atau tidak dalam kawasan tersebut yang tersembunyi untuk tambang atau pengusaha,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Hamka Kadi (F-PG), selama izin alih fungsi hutan

yang DPCLS untuk kepentingan rakyat, tidak ditumpangi oleh pengusaha-pengusaha yang ingin mengeruk keuntungan seperti tambang. “Pada prinsipnya dapat disetujui oleh DPR, tapi apabila ada dalam perencanaan RTRWP masih ditumpangi kepentingan tambang pasti di tolak,” kata Hamka.

Yang dikhawatirkan Komisi IV adalah ketika nantinya ada tambang disitu, yang akan menimbulkan masalah kemudian di kemudian hari. Padahal fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) untuk kepentingan masyarakat dan masyarakat juga sudah ada yang memiliki sertifikat dan tinggal turun menurun. “Kalau ada yang menumpang disitu, kita coret, jangan sampai kita menyetujui yang nantinya untuk tambang timah,” tegasnya. (As)

foto: agung/parle



Tim Kunker Komisi V saat meninjau Jembatan Soekarno di Manado, Sulut

Komisi V Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Manado

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sedang giat membangun proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Sebagai wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan Filipina, Sulut sudah mendapat alokasi anggaran APBN yang besar untuk infrastruktur.

Usai mengadakan pertemuan dengan para pelaku infrastruktur di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V yang dipimpin Lasarus langsung meninjau proyek pengerjaan jalan dan jembatan di Manado, Senin (27/4). Peninjauan lapangan dimulai ke proyek pengerjaan jalan *bypass* Kairagi-Bengkol yang merupakan proyek jalan nasional yang dibiayai APBN.

Ketika tim Kunker meninjau proyek ini, tampak tak ada kegiatan pengerjaan. Jalan belum sampai ke tahap pengaspalan, tapi masih berupa jalan tanah yang licin dan penuh genangan air. Proyek ini membelah semak belukar dan melintasi sungai kecil. Rencananya proyek pengerjaan jalan ini akan menembus ke Pelabuhan Manado yang di sana juga ada pengerjaan jembatan Dr. Ir. Soekarno.

Usai meninjau proyek Kairagi-Bengkol, tim langsung meninjau jalan SBY-Matungkas yang merupakan bagian dari akses tol Manado-Bitung sepanjang 39 km. Di sini tampak ada kesibukan pengerjaan jalan. Hambatan proyek ini masih pada pembebasan lahan. Dari

sini tim langsung melihat pengerjaan proyek jembatan Dr. Ir. Soekarno yang sejak 2003 hingga kini belum juga selesai. Terlihat ada kesibukan pengerjaan di proyek jembatan ini.

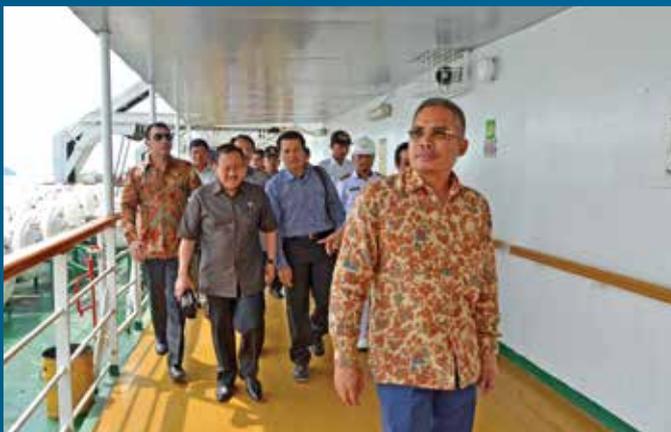
Proyek jembatan yang membelah Pelabuhan Manado itu dibiayai APBN dan kelak menjadi ikon Manado. Diharapkan tahun 2015 ini proyek selesai dibangun. Proyek ini, memang, sempat dipertanyakan karena begitu lama belum juga rampung. Padahal, sudah dicanangkan sejak Megawati masih menjabat Presiden. Kendala anggaran yang macet jadi persoalan proyek ini. Kelak jembatan tersebut menjadi jalur wisata yang menggenjot angka pertumbuhan di Sulut. (mh) foto: husen/parle



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di dampingi Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan Komisi Yudisial di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta. Kamis (30/4) Foto: Denus/Parle



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon melakukan audiensi dan melepas Delegasi Sumbar Talenta ke Aljazair, di Gedung Nusantara III DPR Jakarta, Kamis (30/4) Foto: Hamdiz/Parle



Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau salah satu kapal penumpang rute Medan-Batam, Jakarta yang bersandar di Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, Rabu (29/04)Foto: Sofyan/Parle

Tim Kunker Komisi VI DPR RI mendapat penjelasan mengenai roadmap pariwisata di Bintan dari Bupati Bintan, di Bintan Expo Center, Tanjung Pinang, Selasa (28/04) Foto: Sofyan/Parle